

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan Eksistensi Sekolah di SD IT Rabbani

¹Sulaeman, ²Hastina

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Bone

email: sulaemanalijentak@gmail.com, hastinakhililah@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the management of community empowerment in maintaining the existence of schools at SD IT Rabbani. The author applied qualitative research. The data was analyzed in the process of data reduction method, presentation of data and drawing conclusions. Furthermore, deductive thinking is used, namely taking some general facts which are then analyzed to apply specific things. SD IT Rabbani adheres to a community empowerment management system in maintaining school existence, where the school provides sufficient space for parents to take part in the planning process, policy determination to decision making. Therefore, with the management of Community Empowerment Management, it turns out to be able to have a very significant impact, especially in achieving the school's vision, objectives and goals so as to be able to maintain the existence of SD IT Rabbani. The Community Empowerment Management has been able to make SD IT Rabbani one of the leading schools that are in great demand by the community who search for elementary school.

Keywords: *Management, Community Empowerment Management, School Existence*

PENDAHULUAN

Ilmu manajemen merupakan cabang dari ilmu ekonomi, namun saat ini ilmu manajemen tidak hanya dikaitkan dengan ilmu sosial, tetapi juga sudah masuk dalam ilmu yang terkait dengan ilmu eksakta, atau non sosial, seperti manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen produksi, manajemen agroindustri, manajemen sumber daya alam, dan lain sebagainya.¹ Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sebuah istilah yang sudah sangat populer di Indonesia, berhubung bidang yang satu ini sangat erat kaitannya dengan ketidakberdayaan, atau kemiskinan yang menjadi permasalahan mendasar negeri ini.

Manajemen adalah seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan.² Manajemen menjadi sangat penting untuk menjalankan organisasi mencapai tujuan secara efektif terlebih dalam dunia pendidikan. Pada masa Orde Baru, masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pendidikan dikarenakan seluruh kebijakan dan sistem pendidikan diselenggarakan secara sentralistis dengan *top-down policy* yang mengabaikan masukan masukan dari luar sistem pemerintahan sehingga penyelenggaraan pendidikan terkesan hanya sebagai perpanjangan tangan penguasa semata.

¹Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (De La Macca, 2018), h. 1.

²Malayu S P Hasibuan, *Organisasi Dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 10.

Kondisi yang kian berubah menjadikan keputusan pembangunan pendidikan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan menerapkan prinsip *people-centered development*.³ Partisipasi di sini ditafsirkan sebagai bentuk kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), melaksanakan (*actuating*), dan mengontrol (*controlling*). Dengan demikian pendidikan tersebut berlangsung “dari, oleh, dan bersama masyarakat.”⁴ Dalam konteks otonomi daerah, sudah seharusnya penyelenggaraan pendidikan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang memiliki relevansi dengan masyarakat terkait, serta mengikutsertakan secara aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan.

Pengelolaan Lembaga Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari permasalahan dimana Sebagian besar *problem* Lembaga pendidikan terletak pada ketidakharmonisan hubungan sekolah dengan masyarakat, sehingga berdampak pada citra dan mutu pendidikannya. Maka tidak mengherankan, belakangan ini terdapat banyak lembaga pendidikan yang kekurangan peserta didik salah satu penyebabnya karena sekolah tersebut kurang transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pendidikan, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak memiliki wadah untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapinya terutama bagi perkembangan anaknya. Disisi lain, pihak Lembaga pendidikan tidak bisa serta merta mengenyampingkan masyarakat sebagai pengguna sebab orang tua siswa dan masyarakat secara umum memiliki tanggungjawab dalam memajukan dunia Pendidikan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 16 dinyatakan bahwa:

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 16 dinyatakan bahwa: “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.”⁵

Berdasarkan Undang Undang tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki peran strategis untuk dilibatkan dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan dengan mempertimbangkan mengenai khas Agama, Aspek Sosial budaya, serta penyampaian aspirasi dan memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga benar benar terwujud bahwa Pendidikan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

³Tjokrowinoto Moeljarto, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, Dan Strategi* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 80.

⁴H. A. R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia; Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.80.

⁵ “Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003): pasal 1 ayat (16).

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana Manajemen Pemberdayaan Masyarakat didalam mempertahankan eksistensi sekolah SD IT Rabbani.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni.⁶ Ada wadah pengetahuan tentang manajemen yang terorganisir, ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa manajemen dapat dibuktikan kebenarannya secara umum. Kemahiran timbul melalui pengalaman, pengamatan dan studi, serta kewajiban untuk menerapkan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menuntut adanya kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu manajemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi. Jika salah satu meningkat, maka yang lain juga harus meningkat, dibutuhkan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut. Manajemen sudah sama tuanya dengan peradaban manusia.

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an, seperti firman Allah dalam QS. As-Sajadah/32:5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَغْرُبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.⁷

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁸

⁶ George R Terry, *Prinsip Prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 10.

⁷ Kementerian Agama RI, “Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya” (Surabaya: Halim, 2013).

⁸ Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), h.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*).⁹

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁰

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹¹

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerpull*) sehingga terjadi keseimbangan.¹² Dalam artian bahwa pemberdayaan harus mampu memberikan kontribusi dalam memperoleh kekuatan.

Berdasarkan serangkaian pengertian pemberdayaan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok dalam masyarakat, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

⁹ Totok Mardikanto and Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁰Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT," *Refika Aditama* (2005): h. 53.

¹¹Zubaedi, "Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jakarta: Ar Ruzz Media* (2007): h. 42.

¹²Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹³ Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

Penelitian deskriptif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yang melibatkan Kepala Sekolah, Guru dan Orang Tua Siswa di SD IT Rabbani. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Data dengan tiga Langkah; reduksi data, penyajian data dan pengambilan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah SD IT Rabbani

SD IT Rabbani merupakan sekolah dengan pemberdayaan masyarakat yang cukup bagus. Citra positif yang terus disebarkan melalui sebuah pemberdayaan masyarakat. Peran orangtua murid menjadi sangat vital dalam suatu lembaga pendidikan, terlebih jika pendidikan yang berbasis swasta. Manajemen pemberdayaan masyarakat yang tertata rapi akan semakin memperluas citra positif dari sekolah.

Manajemen sebagai *basic*/dasar dalam pengelolaan sekolah, lebih lanjut kepala sekolah SD IT Rabbani menuturkan bahwa:

Dari sisi fungsi manajemen seperti *planning, organizing, actuating, controlling*. lembaga yang baik harus didasari dengan perencanaan yang matang sebelum segala sesuatunya kita lakukan dalam suatu proses pembelajaran didalam lembaga pendidikan, maka *planning* ini menjadi hal yang mendasar dalam merencanakan segala bentuk aktivitas.¹⁶

Dalam perumusan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, A. Tajuddin, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD IT Rabbani melalui wawancara mengatakan bahwa:

Keterlibatan masyarakat dalam sekolah telah memperoleh peran yang cukup besar, signifikan dan sangat strategik. Sekolah menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan yang berlangsung. Jadi masyarakat itu sebagai bentuk *the real controlling*, pengontrol yang sesungguhnya dalam kegiatan belajar mengajar. Makanya dalam suatu bentuk *trilogy* antara pendidikan sekolah, masyarakat dalam hal ini orangtua dan pemerintah itu sebuah bentuk rantai yang tidak bisa terpisah sama sekali. Jadi pada

¹³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. I. (Bandung, 2007), h. 60.

¹⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

¹⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta* (2006): 120–123.

¹⁶A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

dasarnya, manajemen pemberdayaan masyarakat itu sangat *real* untuk menjembatani salahsatu fungsi daripada lembaga pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁷

Dari hasil penjelasan tersebut dapat penulis pahami bahwa SD IT Rabbani sangat memperhatikan dan mengedepankan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengembangan dan perumusan program kerja sekolah. Manajemen yang baik dan terukur akan membentuk sistem yang bermanfaat untuk pengembangan sekolah.

Disisi lain dalam menjaga eksistensi sekolah maka perlu memperhatikan dan menjalankan dengan baik tahapan didalam pemberdayaan masyarakat. Adapun tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan Tahap perencanaan suatu kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, Tahapan persiapan mencakup tahapan umum (penyusunan kegiatan dan pembentukan panitia, dll) hingga tahapan khusus (menyangkut hal yang akan dilaksanakan) dan sampai kepada Proses penyiapan sarana dan prasarana penunjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh A. Riska Sartina selaku guru sekaligus staff bagian humas SD IT Rabbani bahwa:

Tahap persiapan awal program kerja diawali dengan Presentasi manajemen sekolah untuk menjalankan suatu program kemudian diteruskan ke pihak humas untuk dimusyawarahkan kembali. Dan kembali untuk dimusyawarahkan ke pihak manajemen sekolah untuk tindak lanjut, kemudian dilempar kembali ke humas sekolah untuk dijalankan dan diadakan. Sosialisasi dengan pihak internal sekolah, dengan para wali kelas, orang tua murid, sosialisasi terbuka dengan memanfaatkan social media yang ada, dan menggunakan media cetak seperti baliho dan spanduk. Musyawarah dengan komite sekolah melalui POM setiap bulan, musyawarah untuk meluruskan masalah yang dihadapi oleh orangtua murid.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis pahami bahwa tahap persiapan awal program kerja yang dijalankan sekolah selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, sejak awal orangtua sudah menunjukkan keberadaannya untuk aktif berpartisipasi memberikan masukan kepada sekolah dengan pertimbangan dan kesepakatan yang matang, maka sebuah program kerja dicanangkan sekolah akan menghasilkan output yang baik.

2. Tahap pengkajian

Pengkajian merupakan proses penyelidikan atau pelajaran secara mendalam untuk menemukan masalah maupun solusi dari suatu kegiatan. Tahapan ini merupakan proses untuk merumuskan masalah dan mencari jalan keluar dari suatu kondisi yang kurang baik.

Dalam proses pengkajian dan penyelidikan untuk menemukan masalah maupun solusi dari suatu kegiatan,

¹⁷A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

¹⁸A. Riska Sartina, guru dan Staff Humas, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis, 06 April 2021

Sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Riska Sartina selaku guru sekaligus sebagai staff bidang Humas SD IT Rabbani bahwa:

Dalam proses pengkajian, Musyawarah dari pihak manajemen sekolah dulu untuk merumuskan masalah yang dihadapi dari program kerja yang lalu dan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat lebih aktif dan maksimal untuk program kerja selanjutnya. Pengkajian yang dimaksud adalah mengkaji program-program kerja yang telah lalu dengan kata lain mengakumulasi semua masalah atau kendala yang dialami oleh orangtua murid maupun pihak internal sekolah untuk disusun dan diprogram kembali dengan harapan partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat lebih besar dan lebih aktif.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa proses pengkajian/penyelidikan secara mendalam yang dijalankan sekolah dilakukan dengan mengakumulasi masalah maupun kendala pada program kerja yang lalu untuk memperluas kinerja dari sekolah.

3. Tahap perencanaan alternatif program

Pada tahapan ini tugas sekolah sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat menilai beberapa program alternatif dan kegiatan yang dapat dilakukan sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Sekolah SD IT Rabbani bahwa:

Ada beberapa hal untuk mengidentifikasi potensi pemberdayaan masyarakat, *pertama*: Tolak ukurnya harus obyektif dalam memandang peran dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, *kedua*: Tolak ukur kepentingan sekolah, sampai sejauh mana sekolah memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan dan subsidi silang lintas kreativitas sehingga masyarakat merasa bahwa mereka diberikan penghargaan dan apresiasi ketika melakukan sedikit stimulasi pengembangan sekolah, yang *ketiga*: Dilaksanakan secara sistematis, terukur, ada pola, ada perencanaan, ada pergerakan, dan ada sifatnya pelebagaan sehingga masyarakat juga bisa menarik suatu benang merah ketika ada suatu kegiatan yang bisa terlaksanakan dengan baik di sekolah. Mereka juga bisa mendapatkan penghargaan dan bisa meningkatkan dan mengembangkan kreativitasnya di tengah masyarakat yang sudah memberikan opini/kreativitas yang terbaik untuk sekolah. Yang *keempat*: Dianalisis secermat mungkin. Kemudian tolak ukur kepentingan sekolah itu untuk melihat potensi sudut pandang kebutuhan sekolah di masa yang akan datang.²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis pahami bahwa dalam mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat *pertama* :Tolak ukurnya harus obyektif dalam memandang peran dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, *kedua* :Tolak ukur kepentingan sekolah, sampai sejauh mana sekolah memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan dan subsidi silang lintas kreativitas, *ketiga*: Dilaksanakan secara sistematis, terukur, sehingga masyarakat juga bisa menarik suatu benang merah ketika ada suatu kegiatan yang bisa terlaksanakan dengan baik di

¹⁹A. Riska Sartina, guru dan Staff Humas, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis, 06 April 2021

²⁰A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

sekolah. *keempat*: Dianalisis secermat mungkin. Kemudian tolak ukur kepentingan sekolah itu untuk melihat potensi sudut pandang kebutuhan sekolah di masa yang akan datang.

4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang ada.

Dalam tahap pergerakan atau pemfomalisasi rencana aksi, Kepala sekolah menuturkan bahwa:

Actuating adalah pergerakan, dimana seluruh pilar-pilar seluruh inti gerakan dalam melakukan perubahan berada pada poros kegiatan ini yaitu pada proses ini. Dimana disana ada aksi untuk melakukan misi-misi yang telah dirancang dan dibuat pada proses perencanaan tersebut.²¹

Hal senada juga diutarakan oleh A. Riska Sartina selaku guru sekaligus staff Humas SD IT Rabbani bahwa:

Dalam tahap pemfomalisasi rencana aksi, musyawarah dan komunikasi dalam bentuk *online* atau *offline* harus terus dikedepankan, ketika sekolah dan orangtua telah menyepakati sebuah program, maka sekolah akan membentuk tim khusus untuk mengawal suatu program kerja yang biasanya terdiri 9 orang.²²

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa dalam tahap pemfomalisasi rencana aksi yang dijalankan sekolah, sekolah membentuk tim khusus untuk mengawal program yang telah disepakati untuk memantau dan menjaga setiap langkah atau tahap yang berjalan dalam suatu program, dimana seluruh pilar-pilar ikut aktif dalam memberikan kontribusi.

5. Tahap implementasi program yang dijalankan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh A. Tajuddin selaku Kepala Sekolah SD IT Rabbani bahwa:

Controlling, melakukan pengontrolan itu sedianya model yang sangat aplikatif dan sifatnya untuk mengontrol perilaku-perilaku atau model yang sudah kita lakukan sehingga hampir seluruh bentuk kegiatan yang menjadi hal prinsipil dalam mengembangkan dan menguatkan strategi kita dalam mencapai mutu sekolah berada dalam pengawasan yang baik.²³

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa dalam tahap implementasi program yang dijalankan sekolah perlu dan harus senantiasa dibarengi dengan *controlling*,

²¹A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

²²A. Riska Sartina, guru dan Staff Humas, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis, 06 April 2021

²³A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

sehingga semua kegiatan yang menjadi hal prinsipil dalam menguatkan strategi berada dalam pengawasan yang baik.

6. Tahap evaluasi dari implementasi program kerja

Proses pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Tahap evaluasi dari implementasi program kerja dari sekolah dijabarkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

Dalam setiap kinerja dan perilaku dan tahapan operasional tentu diakhir kita harus melakukan evaluasi dengan baik, dengan evaluasi itu ada 3 hal yang muncul yaitu yang pertama Sejauhmana pekerjaan sudah dilakukan, yang kedua Masalah-masalah yang timbul dan bagaimana pemecahannya dan yang ketiga Bagaimana rencana tindak lanjut yang harus dikembangkan kedepannya dalam mengantisipasi segala bentuk kemungkinan yang telah terjadi yang sifatnya baik secara operasional maupun yang non operasional sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan *evaluating* yang secara berkala yang dapat memberikan eksistensi tersendiri terhadap keberadaan organisasi/lembaga pendidikan tersebut. Lebih eksis dan lebih mengedepankan berdaya guna dan berhasil guna.²⁴

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan dari A. Riska Sartina selaku guru sekaligus staff Humas bahwa:

Setelah program kerja dijalankan, maka dimaksimalkan untuk diadakan musyawarah evaluasi saat selesai program itu juga atau di akhir pekan. Evaluasi umum sampai evaluasi khusus individu-individu jika memang itu diperlukan. Evaluasi berisi tentang kelemahan dari program kerja sebelumnya untuk dijadikan bahan acuan untuk lebih memaksimalkan program kerja selanjutnya.²⁵

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat peneliti pahami bahwa Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama.

Manajemen pemberdayaan masyarakat dalam mempertahankan eksistensi sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD IT Rabbani menuturkan bahwa:

Partisipasi orangtua dalam sekolah memang sangat dirasakan dukungannya sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu peran lembaga dalam membentuk sebuah komite sekolah bukan hanya sekedar memasang nama dan struktur organisasi tanpa melihat, memperjelas sekaligus mempertegas bagaimana tupoksi dan peran utama kelembagaan masyarakat dalam menjembatangi tujuan mulia dari sekolah.

Partisipasi oleh orangtua tidak hanya sebatas melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi dia harus berubah wujud menjadi nilai kreativitas yang tinggi mengarah pada bentuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam rutinitas yang memang dibentuk oleh ide dan gagasan yang kreatif, itu adalah salahsatu urgensi dari pemberdayaan masyarakat.

²⁴A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

²⁵A. Riska Sartina, guru dan Staff Humas, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis, 06 April 2021

Keterlibatan masyarakat dalam sekolah memang sangat penting, bagaimanapun masyarakat adalah wadah, sarana, tempat, ataupun media yang menyediakan input bagi proses pendidikan itu sendiri sehingga pelibatan masyarakat harus terjawantahkan dengan beberapa nilai dan poyek dan aksi kasi kegiatan yang nyata. Oleh karena itu untuk memperkuat dan mengokohkan eksistensi sekolah, peran pemberdayaan masyarakat sangat penting dan menjalin hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat itu sendiri.²⁶

Hal tersebut diperkuat oleh ibu Nahira selaku orangtua Murid menyatakan bahwa:

Eksistensi dari sekolah ini cukup bagus diantara sekolah lain yang sejenis, disini kami merasa bahwa visi kami sebagai orangtua sejalan dengan visi yang dijalankan sekolah, buktinya dua anak saya semua saya sekolahkan disini.²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa dalam meningkatkan kualitas dan mutu sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada. Selain itu, Partisipasi oleh orangtua menjadi sangat penting dan *urgent* dalam perspektif pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi dia harus berubah wujud menjadi nilai kreativitas yang tinggi mengarah pada bentuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam rutinitas yang memang dibentuk oleh ide dan gagasan yang kreatif demi pengembangan mutu sekolah

Lebih lanjut Kepala Sekolah SD IT Rabbani kembali menegaskan bahwa:

Masyarakat perlu melakukan *monitoring* dan *evaluating* terhadap *performance* sekolah itu karena bisajadi secara internal kepala sekolah tidak mampu memotret seluruh kejadian atau bisa jadi ada potret tersendiri dalam bentuk *the legal of cctv* dalam artian masyarakat mungkin memiliki cctv tersendiri yang mungkin secara spesifik dan secara khusus tidak diketahui oleh pihak sekolah dan secara berkala ada yang namanya temu kangen dan temu inspirasi dengan pihak sekolah untuk saling bertukar informasi untuk saling membangun dan kontrol masyarakat yang kuat ketika mereka merasakan bahwa hari ini sangat penting bagaimana sekolah itu berjalan sesuai dengan poros sumbu yang utama yaitu penguatan nilai-nilai kompetensi dan keterampilan dan pengembangan nilai-nilai sikap dan karakter yang baik.

Pihak pengembangan masyarakat mengembangkan strategi pengembangan siswa itu diluar daripada *basic* sekolah itu sendiri artinya ada tawaran yang lebih mutual yang lebih *high quality* oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan proses yang mendasar terutama proses eksekusi kegiatan yang dianggap sudah tidak modern dan *up to date* lagi sehingga peran lembaga masyarakat itu dengan tawaran eksistensi yang bagus sehingga menguatkan atau memberikan ujian tersendiri kepada sekolah bahwa seperti ini kegiatan proses pembelajaran yang baik, metode-metode pembelajaran yang baik, system penilaian yang terbaik kepada peserta didik dan hampir di sekolah barat seperti Australia, Finlandia dan Jerman melakukan strategi seperti ini untuk pengembangan eksistensi lembaga masyarakat untuk memantau dan memotret sekolah agar sekolah tetap berada dalam koridor yang bisa

²⁶A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *Whatsapp*, 10 April 2021

²⁷Nahira, Orangtua Murid, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis, 06 April 2021

dipertanggung jawabkan baik secara nilai, *performance*, kelembagaan, yang akan mengarah pada pembentukan sikap dan citra positif di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Berdasarkan hasil dokumentasi Data Statistik SD IT Rabbani yang peneliti dapatkan, terlihat bahwa jumlah peminat/siswa di SD IT Rabbani setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut merefleksikan bahwa eksistensi yang ditunjukkan oleh sekolah cukup bagus di mata masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa ada beberapa hal dalam mempertahankan eksistensi sekolah yaitu dengan membuat rekomendasi/bentuk penguatan kesepahaman dengan masyarakat dengan bukti konkrit, buatlah dengan perjanjian atau membuat *Memorandum Of Understanding/ Memorandum Of Agreement*, mengembangkan karakter sekolah hari ini sebagaimana hari ini sebagai nilai dari pengejawantahan kurikulum 2013 yang berbasis karakter, sekolah dianalisis berdasarkan karakternya, tentu pendekatan berbasis karakter dengan melibatkan masyarakat sebagai salah satu media pendukung kegiatan pembelajaran. Memasukkan nilai-nilai kontrak dengan tujuan membuat konsistensi dengan pengembangan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas oleh peneliti di Sekolah SD IT Rabbani, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Manajemen pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang cukup besar dan sangat mempengaruhi serta memperkuat ketahanan dari eksistensi sekolah, dengan pemberdayaan masyarakat, sekolah memberikan ruang gerak yang cukup luwes, kepada orangtua murid untuk memberikan masukan, kritikan bahkan turut andil/berpartisipasi dalam proses perencanaan, penetapan kebijakan hingga evaluasi program, disisi lain pola-pola kerjasama antara sekolah dan masyarakat terus terjalin dengan baik sehingga memudahkan dalam pencapaian visi, misi hingga program kerja sekolah.

Sebagai penutup bahwa Penelitian ini masih terbatas pada satu Lembaga Pendidikan saja sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk generalisasi. Tidak memungkinkan diperoleh pemahaman yang komprehensif. Sejalan dengan itu masih dibutuhkan penelitian lanjutan dengan mengakomodasikan lebih banyak Lembaga Pendidikan demi untuk pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap manajemen pemberdayaan masyarakat dalam menjaga eksistensi sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta*

²⁸A. Tajuddin, Kepala Sekolah, SD IT Rabbani, Wawancara oleh Penulis Melalui Via *WhatsApp*, 10 April 2021

(2006): 120–123.

Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca, 2018.

Hasibuan, Malayu S P. *Organisasi Dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Moeljarto, Tjokrowinoto. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

RI, Kementerian Agama. “Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya.” Surabaya: Halim, 2013.

Risyanti, Rosmedi dan Riza. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.

Suharto, Edi. “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT.” *Refika Aditama* (2005).

Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Cet. I. Bandung, 2007.

Terry, George R. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Ulfi Putra Sany. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur’an.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32.

Zubaedi. “Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.” *Jakarta: Ar Ruzz Media* (2007).

“Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).